

INCOME DISTRIBUTION OF PAJAELE FISHING COMMUNITIES BASED ON ISLAMIC ECONOMICS

Adi Wijaya¹

¹Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

E-mail: ¹Adiwijaya@iainpare.ac.id*

*Corresponding Author

Received: April 10, 2025; Accepted: Mei 23, 2025; Published: Juli 12, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem distribusi pendapatan nelayan serta peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses distribusi hasil tangkapan di wilayah pesisir Pantai Pajalele. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji peran pabbise sebagai perantara antara nelayan dan aktivitas pemasaran di darat, mekanisme bagi hasil yang diterapkan, serta dampaknya terhadap pendapatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas pendapatan nelayan dan penjual ikan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi alam dan struktur distribusi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan nelayan, pabbise, penjual ikan, dan pengepul, serta dokumentasi pendukung. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem distribusi pendapatan nelayan di Pantai Pajalele. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabbise memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kelancaran distribusi hasil tangkapan nelayan. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap peran pabbise menyebabkan sistem distribusi rentan terhadap hambatan non-teknis. Sistem bagi hasil yang diterapkan mencerminkan nilai kerja sama dan solidaritas ekonomi, tetapi belum sepenuhnya menjamin pembagian risiko yang adil, terutama bagi penjual ikan. Selain itu, pendapatan nelayan dan pelaku distribusi sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi alam, sehingga mendorong masyarakat pesisir untuk melakukan diversifikasi sumber penghasilan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguatan posisi nelayan, perbaikan sistem distribusi, serta pengembangan ekonomi pesisir yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Nelayan, Distribusi Pendapatan, Pabbise, Sistem Bagi Hasil, Masyarakat Pesisir

Abstract

This study aims to analyze the income distribution system of fishermen and the roles of the actors involved in the catch distribution process in the coastal area of Pajalele Beach. The main focus of this study is to examine the role of pabbise as an intermediary between fishermen and onshore marketing activities, the profit-sharing mechanisms implemented, and their impact on the income and economic sustainability of fishing communities. This study also aims to identify factors influencing the income stability of fishermen and fish sellers, particularly those related to natural conditions and existing distribution structures. The research method used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with fishermen, fish sellers, and collectors, as well as supporting documentation. The data obtained was analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive picture of the fishermen's income distribution system on Pajalele Beach. The results show that the fisheries management (PABBIS) plays a very strategic role in ensuring the smooth distribution of fishermen's catches. However, the high dependence on the PABBIS makes the distribution system vulnerable to non-technical obstacles. The profit-sharing system implemented reflects the values of cooperation and economic solidarity, but it does not fully guarantee fair risk sharing, especially for fish sellers. Furthermore, the incomes of fishermen and distributors are heavily influenced by the seasons and natural conditions, encouraging coastal communities to diversify their income sources. The contribution of this research is expected to be a reference for local governments and stakeholders in formulating policies that support strengthening the position of fishermen, improving distribution systems, and developing a more equitable and sustainable coastal economy.

Keywords: *Fishermen, Income Distribution, Pabbise, Profit Sharing System, Coastal Communities*

Pendahuluan

Wilayah laut mencapai sekitar 7.827.087 km², jumlah pulau sekitar 17.504, serta garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km. Lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia berupa perairan, menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, baik yang bersifat terbarukan seperti perikanan, mangrove, terumbu karang, dan energi laut, maupun yang tidak terbarukan seperti minyak, gas bumi, dan mineral, memberikan potensi ekonomi maritim yang diperkirakan mencapai 7.200 triliun rupiah per tahun. Potensi besar ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(Farhani, 2022)

Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia secara serius menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional terus didorong agar meningkat secara signifikan. Selain itu, sektor perikanan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup para pelakunya, khususnya nelayan tradisional yang jumlahnya mencapai sekitar 7,3 juta orang dan berkontribusi lebih dari 80% terhadap produksi ikan nasional. Dengan demikian, keberhasilan sektor perikanan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga berperan penting dalam menekan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mencegah arus urbanisasi dari wilayah pesisir ke perkotaan.

Namun, besarnya potensi kelautan Indonesia belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan secara merata. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tradisional masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti keterbatasan modal, penggunaan alat tangkap tradisional, ketergantungan pada kondisi cuaca, serta lemahnya posisi tawar dalam sistem pemasaran hasil tangkapan. (Alifa & Rahmadian, 2024) Kondisi ini menyebabkan pendapatan nelayan bersifat fluktuatif dan tidak menentu, bahkan dalam kondisi tertentu nelayan tidak dapat melaut selama berbulan-bulan akibat cuaca buruk. Selain itu, praktik penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing yang menggunakan alat tangkap merusak turut memperparah kerentanan ekonomi nelayan lokal. Mochamad Arief Hidayat, Dalam Rangka Ketahanan Nasional Oleh : Program Pendidikan Reguler Angkatan (Ppra) Lxvi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024 Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap), 2024.

Kondisi tersebut juga dialami oleh masyarakat nelayan di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dari total jumlah penduduk Desa Binanga Karaeng sebanyak 2.480 jiwa, terdapat sekitar 739 orang yang berprofesi sebagai nelayan. Mayoritas nelayan di wilayah ini masih menggunakan alat tangkap tradisional dan sangat bergantung pada kondisi alam. Pendapatan yang diperoleh dari hasil melaut menjadi sumber utama penghidupan, namun jumlahnya tidak menentu dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Ketergantungan penuh pada hasil tangkapan ikan menyebabkan nelayan berada pada posisi ekonomi yang rentan, terutama ketika cuaca tidak mendukung aktivitas melaut.

Lebih jauh, permasalahan ekonomi nelayan di Pajalele tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan, tetapi juga menyangkut mekanisme distribusi pendapatan itu sendiri. Dalam praktiknya, distribusi pendapatan nelayan masih cenderung tidak adil dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan aspek fundamental yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan keberkahan (*al-barakah*). Distribusi pendapatan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada hasil akhir, tetapi lebih menekankan pada proses pendistribusian yang sesuai dengan syariat, termasuk kejelasan akad, pembagian hasil yang proporsional, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. (Wijaya et al., 2023)

Realitas yang terjadi di masyarakat nelayan Pajalele menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Mekanisme pembagian hasil tangkapan sering kali belum memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, sehingga berpotensi merugikan nelayan kecil. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian yang mendalam mengenai bagaimana distribusi pendapatan nelayan dilaksanakan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (Ramadani et al., 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji mekanisme distribusi pendapatan masyarakat nelayan di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai praktik distribusi pendapatan nelayan, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi dalam upaya mewujudkan sistem distribusi pendapatan yang

adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), karena data diperoleh secara langsung dari realitas sosial masyarakat nelayan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang berkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat nelayan Pajalele berdasarkan perspektif ekonomi Islam. (Safarudin et al., 2023) Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dengan waktu pelaksanaan kurang lebih satu bulan. Lokasi ini dipilih karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada hasil laut dengan pendapatan yang tidak menentu. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme distribusi pendapatan masyarakat nelayan Pajalele, meliputi proses pembagian hasil tangkapan serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. (Maharani, 2025)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat nelayan yang memiliki keterkaitan dengan proses distribusi pendapatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang relevan. (Kamaruddin, 2025) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan mendalam. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, waktu, maupun tempat. (Ash-shiddiqi et al., 2025) Data yang telah dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh praktik distribusi pendapatan masyarakat nelayan Pajalele serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah pesisir Pantai Pajalele, diketahui bahwa sistem distribusi hasil tangkapan nelayan melibatkan beberapa aktor utama, yaitu nelayan, pabbise, penjual ikan, dan pengepul. Setiap aktor memiliki peran yang saling

berkaitan dalam memastikan hasil tangkapan dapat sampai ke konsumen. Pola hubungan ini membentuk suatu sistem distribusi yang bersifat tradisional namun telah berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat pesisir.(Ramadani et al., 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabbise memegang peran yang sangat strategis dalam sistem distribusi hasil tangkapan nelayan. Pabbise berfungsi sebagai penghubung utama antara nelayan yang berada di laut dengan aktivitas pemasaran ikan di darat. Tanpa keberadaan pabbise, hasil tangkapan nelayan tidak dapat segera didistribusikan, sehingga berpotensi mengalami penurunan kualitas dan nilai jual.(Sarma, 2024)

Tingginya ketergantungan nelayan terhadap pabbise menyebabkan sistem distribusi menjadi sangat rentan terhadap hambatan non-teknis. Apabila pabbise mengalami kendala, seperti sakit atau keterbatasan tenaga, maka seluruh alur distribusi akan terhambat. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan penjualan ikan dan penerimaan pendapatan nelayan serta penjual ikan.

Dari sisi pembahasan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur distribusi yang terlalu bergantung pada satu perantara menciptakan kerentanan sistemik. Ketergantungan ini memperlemah posisi tawar nelayan, karena mereka tidak memiliki alternatif jalur distribusi yang memadai. Akibatnya, nelayan cenderung menerima kondisi yang ada tanpa memiliki ruang negosiasi yang kuat.(Ramadani et al., 2025)(GarboAnomMuhamadNurlchsan, 2024)

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam distribusi hasil tangkapan mencerminkan nilai kerja sama dan solidaritas ekonomi dalam masyarakat nelayan Pajalele. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak, sehingga setiap aktor memperoleh bagian dari hasil distribusi.(Sarma, 2024) Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam distribusi hasil tangkapan mencerminkan nilai kerja sama dan solidaritas ekonomi dalam masyarakat nelayan Pajalele. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak, sehingga setiap aktor memperoleh bagian dari hasil distribusi.(Asni et al., 2023)

Temuan ini sejalan dengan penelitian Asni et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem bagi hasil dalam komunitas nelayan umumnya berkembang sebagai bentuk mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan hubungan kerja antaraktor. Dalam konteks masyarakat nelayan Pajalele, sistem bagi hasil berfungsi sebagai instrumen pengikat solidaritas, di mana

setiap pihak merasa memiliki keterikatan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan aktivitas penangkapan dan distribusi ikan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berperan sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kohesi sosial.

Namun demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pembagian risiko yang adil. Penjual ikan menjadi pihak yang paling rentan menanggung kerugian apabila ikan tidak habis terjual atau mengalami penurunan harga. Sementara itu, nelayan dan pabbise relatif lebih terlindungi dari risiko kerugian langsung.(Oktaviany et al., 2025)

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat nelayan Pajalele bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kesepakatan pembagian keuntungan umumnya tidak tertulis, tetapi dipahami bersama sebagai norma sosial yang mengikat. Pola ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan (trust) antaraktor distribusi, yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi nelayan.

Keberadaan modal sosial dalam sistem bagi hasil turut memperkuat relasi kerja sama jangka panjang antara nelayan, pabbise, dan penjual ikan.(Sadat, 2024) Hubungan yang terbangun tidak semata-mata bersifat transaksional, tetapi juga bersandar pada ikatan sosial dan kekerabatan. Kondisi ini memungkinkan sistem distribusi tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, seperti fluktuasi harga ikan dan ketidakpastian hasil tangkapan.

Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada kesepakatan informal juga berpotensi menimbulkan kerentanan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Tanpa adanya aturan tertulis yang jelas, penjual ikan sering kali berada pada posisi menerima keputusan yang telah disepakati sebelumnya, meskipun harus menanggung risiko ekonomi yang lebih besar. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan kesadaran kolektif mengenai keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko.(Anwar et al., 2025)

Dari sudut pandang pengembangan ekonomi pesisir, sistem bagi hasil yang berlandaskan solidaritas perlu diarahkan pada model yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait diperlukan untuk membantu masyarakat nelayan menyusun mekanisme bagi hasil yang lebih transparan dan adil tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Dengan demikian, sistem bagi hasil

tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bersama.

Dari perspektif penjual ikan dan pengepul, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat dipengaruhi oleh musim ikan dan volume hasil tangkapan. Pada saat musim ikan melimpah, aktivitas distribusi meningkat dan pendapatan seluruh pelaku distribusi cenderung stabil bahkan meningkat. Kondisi ini memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat pesisir secara keseluruhan.(Wijaya et al., 2023)

Sebaliknya, pada saat hasil tangkapan menurun akibat cuaca buruk atau faktor alam lainnya, pendapatan para pelaku distribusi menjadi tidak menentu. Ketidakpastian ini memperlihatkan bahwa faktor alam masih menjadi determinan utama dalam sistem ekonomi masyarakat pesisir. Situasi tersebut memperkuat kerentanan ekonomi nelayan dan penjual ikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya strategi adaptif yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir untuk menghadapi ketidakpastian pendapatan. Beberapa penjual ikan dan nelayan memiliki pekerjaan sampingan, seperti bertani, mengelola sawah, atau usaha kecil lainnya. Strategi ini menjadi bentuk upaya mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga.(Fahrullah, 2025)

Strategi adaptif yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir merupakan respons rasional terhadap ketidakpastian pendapatan yang bersumber dari sektor perikanan. Ketergantungan pada hasil tangkapan ikan yang bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam mendorong nelayan dan penjual ikan untuk mencari alternatif sumber penghasilan. Pekerjaan sampingan seperti bertani, mengelola sawah, atau menjalankan usaha kecil menjadi pilihan yang dianggap mampu memberikan tambahan pendapatan sekaligus mengurangi risiko ekonomi.(Hamzah, 2020)

Keterlibatan masyarakat pesisir dalam sektor non-perikanan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya diversifikasi mata pencaharian. Diversifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai strategi bertahan dalam menghadapi masa-masa paceklik ikan. Dengan memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, nelayan dan penjual ikan dapat menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga meskipun pendapatan dari sektor perikanan mengalami penurunan.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, strategi adaptif tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di

lingkungan sekitar. Aktivitas pertanian dan usaha kecil yang dijalankan umumnya bersifat tradisional dan berbasis keluarga, sehingga tidak memerlukan modal besar. Hal ini memungkinkan masyarakat pesisir tetap produktif tanpa harus meninggalkan sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama.

Dari sisi pembahasan, diversifikasi sumber penghasilan ini menunjukkan bahwa sektor perikanan belum sepenuhnya mampu menjadi penopang ekonomi yang stabil. Masyarakat pesisir menyadari pentingnya memiliki sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan ikan yang bersifat musiman.

Strategi adaptif ini juga menunjukkan bahwa sektor perikanan belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang stabil bagi masyarakat pesisir. Ketergantungan pada pekerjaan sampingan menandakan adanya keterbatasan dalam sistem distribusi pendapatan hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, baik melalui penguatan akses pasar, pengelolaan hasil tangkapan yang lebih efektif, maupun pengembangan usaha produktif alternatif yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem distribusi pendapatan nelayan di Pantai Pajalele berjalan dalam suatu mekanisme yang kompleks dan saling bergantung. Kerja sama antaraktor menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meskipun sistem ini masih bersifat tradisional.

Namun demikian, sistem distribusi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan tinggi pada perantara, pembagian risiko yang belum merata, serta ketidakpastian pendapatan akibat faktor alam. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kebijakan yang berpihak pada penguatan posisi nelayan, peningkatan akses pemasaran, serta pengembangan sistem distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi pendapatan masyarakat nelayan di Dusun Pajalele berlangsung melalui mekanisme yang melibatkan banyak pihak, yaitu nelayan, sawi, pabbise, pengepul, dan penjual ikan. Sistem ini menunjukkan adanya kerja sama ekonomi yang saling bergantung, di

mana pendapatan nelayan tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui proses distribusi yang berlapis. Hasil penilaian responden yang didominasi kategori Sangat Tepat dan Tepat menunjukkan bahwa mekanisme distribusi yang berjalan telah dipandang sesuai dan dapat diterima oleh mayoritas pihak yang terlibat.

Selanjutnya, temuan penelitian menjawab permasalahan utama terkait kesesuaian praktik distribusi pendapatan nelayan dengan prinsip ekonomi Islam. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan didasarkan pada kesepakatan bersama dan pembagian peran masing-masing aktor, sehingga mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Selain itu, pemanfaatan pendapatan tidak hanya untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan keagamaan, seperti sedekah dan zakat, yang menunjukkan bahwa praktik distribusi pendapatan nelayan Pajalele sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan distribusi pendapatan nelayan di Pajalele telah terjawab melalui temuan bahwa sistem yang berjalan relatif tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam, meskipun masih terdapat kendala teknis dan risiko yang tidak merata, khususnya pada pihak tertentu seperti penjual ikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem dan dukungan kebijakan agar mekanisme distribusi pendapatan nelayan dapat semakin adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat nelayan di wilayah Pantai Pajalele, khususnya nelayan, pabbise, penjual ikan, dan pengepul, atas partisipasi dan keterbukaan dalam memberikan data dan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan akademik sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ekonomi masyarakat pesisir dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Alifa, (2024). *Menilik Kesejahteraan Nelayan Di Indonesia : Perspektif Sosial Ekonomi Terhadap Kompleksitas*. 359–366.
- Anwar, (2025). *Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy*. 4(6), 485–499.
- Ash-shiddiqi, H., Sinaga, R. W., Audina, N. C., Data, R., & Data, D. (2025). *Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif Hasby*. 3(2), 333–343.
- Asni, A., Rosada, I., & Fadilla, N. (2023). *Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH) : Jurnal Akuakultur , Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan (*
- Fahrullah. (2025). *Strategi Adaptasi Nelayan Pesisir Cilamaya Wetan Dalam Meningkatkan Penghasilan Pasca Pembangunan Pltg. 11*, 86–97.
- Garbo Anom Muhammad Nur Ichsan. (2024). *Evaluasi Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Penggunaan Layanan E-Banking Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3247–3263.
- Hamzah, A. (2020). *Pemberdayaan ekonomi nelayan oleh pt. karya masyarakat mandiri dompet dhuafa di desa tanjung pasir kabupaten tangerang*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kamaruddin. (2025). *Studi pendapatan nelayan berdasarkan jenis alat tangkap nelayan di kecamatan simboro dan kepulauan kabupaten mamuju*. 8, 710–720.
- Maharani, (2025). *Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Evi*. 2(1), 1587–1595.
- Oktaviany, M, (2025). *Metodologi Penelitian Dalam Ekonomi Syariah*. CV Rey Media Grafika.
- Ramadani, (2025). *Tradisional Dan Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap) Ikan Bilih Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Nelayan di Nagari Sumpur Batipuh Selatan Tanah Datar)*. 9(10), 254–266.
- Sadat, A. (2024). *Penguatan Modal Sosial Dalam Pengolahan Ikan Asap Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan*. 5(2), 2564–2576.
- Safarudin, (2023). *Penelitian Kualitatif*. 3, 9680–9694.
- Sarma. (2024). *Studi Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Nelayan*. 9(4), 1401–1409.
- Wijaya, (2023). *Distribusi Pendapatan Masyarakat Nelayan Pajaele Berdasarkan Ekonomi Islam*. 1(1), 49–57.